

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan dalam organisasi pemerintahan terdiri dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Penyusunan laporan keuangan merupakan aturan dalam tahap pertanggungjawaban. Laporan keuangan tersebut dijadikan salah satu dasar pengambilan keputusan oleh pihak eksternal organisasi (Halim dan Kusufi, 2014:3).

Pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Selain asas-asas tersebut, terdapat asas akuntabilitas berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu asas terpenting dalam pengelolaan keuangan yaitu, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan pengelolaan keuangan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rachmat, 2010:315).

Akuntabilitas publik tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan adanya transparansi publik. Bentuk transparansi publik adalah dengan memberikan informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2009:20). Salah satu bentuknya adalah dengan cara melakukan publikasi laporan keuangan kepada khalayak melalui internet.

Penggunaan media internet dapat mempermudah publikasi laporan keuangan pemerintah untuk diakses masyarakat dengan cepat, kapanpun dan dimanapun. Hal ini didukung oleh pendapat Styles dan Tennnyson (2007) yang

menyatakan bahwa internet adalah media yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana yang paling *cost effectiveness* bagi pemerintah untuk mempublikasikan informasi keuangannya dalam bentuk pelaporan secara *online*. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengamanatkan bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana. Oleh karena itu, publikasi laporan keuangan melalui internet seharusnya menjadisangat diperlukan. Kemudahan publik dalam mengakses informasi, diharapkan organisasi publik lebih berorientasi pada kualitas dan pelayanan publik, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance Government*).

Media komunikasi yang sering digunakan adalah melalui internet. *Website* merupakan salah satu media komunikasi yang sangat populer pada saat ini dan menjadi tolok ukur kemanfaatan dan kemudahan dalam mengakses suatu teknologi informasi. *Website* dapat memberikan informasi yang memadai dan valid serta mudah diakses oleh publik. Oleh karena itu, entitas pemerintahan termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memiliki *website* resmi. *Website* resmi ini digunakan untuk memuat berbagai informasi yang berkaitan dengan daerahnya. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Martani (2012) yang menyebutkan bahwa *website* digunakan untuk memberikan informasi umum tentang daerah, informasi kegiatan pelayanan masyarakat, sosialisasi peraturan, dan sarana komunikasi interaktif dengan masyarakat.

Namun fakta yang ada dilapangan membuktikan bahwa pemanfaatan internet oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota belum maksimal. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad (2012) bahwa rata-rata indeks tingkat pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah terbukti lebih rendah daripada rata-rata indeks pengungkapan informasi non keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa *website* pemerintah daerah belum digunakan secara optimal dalam mengungkapkan informasi pelaporan keuangan.

Rendahnya tingkat pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus korupsi pada pemda. Seperti yang telah diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Indonesia (KPK), KPK menetapkan Bupati Bener Meriah, Provinsi Aceh sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Dermaga Sabang pada tahun anggaran 2011 dan negara dirugikan sebesar Rp. 116 miliar (kpk.go.id, 2017). Kasus selanjutnya adalah kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) kedokteran umum di RSUD Tangsel tahun 2012 yang dilakukan oleh Kabid Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang Selatan (kpk.go.id, 2017). Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo, pengawasan yang lemah merupakan salah satu penyebab banyaknya kasus tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah (cnnindonesia.com, 2017). Sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), yang mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sangat rawan dikorupsi karena pengawasan terhadap perencanaan dan penggunaannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak maksimal (antikorupsi.org, 2017). Oleh karena itu, dengan adanya publikasi laporan

keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota melalui internet dinilai dapat membantu untuk mengurangi korupsi. Karena masyarakat juga dapat ikut andil untuk mengawasi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota. Sesuai dengan teori keagenan yang menyebutkan bahwa dengan adanya publikasi laporan keuangan melalui internet dapat mengurangi *monitoring cost* yang disebabkan oleh asimetri informasi antara *agent* dan *principal*.

Dalam hal ini terdapat beberapa penelitian yang menemukan bukti empiris tentang beberapa faktor yang mempengaruhi publikasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota melalui internet. Namun, penelitian-penelitian yang telah dilakukan belum memperoleh hasil yang konsisten. Trisnawati dan Achmad (2014) serta Rahman dkk. (2013) menemukan bahwa kompetisi politik dalam suatu pemerintah daerah akan mendorong publikasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota melalui internet. Berbeda dengan penelitian lain menunjukkan bahwa kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap pelaporan informasi keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota melalui internet (Afriyansyah dan Haryanto, 2013; Sinaga dan Prabowo, 2011; Laswad dkk., 2005)

Ukuran pemerintah daerah yang besar akan mendorong pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk menyediakan informasi keuangan pada situs resmi mereka (Trisnawati dan Achmad, 2014; Medina, 2012; Puspita dan Martani, 2011; Styles dan Tennyson, 2007). Namun beberapa penelitian yang dilakukan oleh Rahman dkk., (2013), Syafitri (2012), Lesmana (2010) dan Laswad dkk. (2005) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak

memiliki pengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota melalui internet.

Leverage sebagai variabel independen dalam penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan Achmad (2014), Rahman dkk., (2013), Styles dan Tennyson (2007) serta Laswad dkk., (2005) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota melalui internet. Sebaliknya, *leverage* tidak berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota melalui internet (Medina, 2012; Syafitri, 2012; Sinaga dan Prabowo, 2011; serta Lesmana, 2010).

Variabel kekayaan suatu pemerintah daerah berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota melalui internet (Trisnawati dan Achmad, 2014; Rahman dkk., 2013; Syafitri, 2012; Hilmi dan Martani, 2011; serta Laswad dkk., 2005). Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Afriansyah dan Haryanto (2013) serta Sinaga dan Prabowo (2011) yang menunjukkan bahwa kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota melalui internet.

Selanjutnya, variabel tipe pemerintah daerah berpengaruh terhadap keputusan pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk mempublikasikan laporan keuangannya melalui internet (Sinaga dan Prabowo, 2011; dan Laswad dkk., 2005). Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Trisnawati dan Achmad (2014), serta Rahman dkk. (2013) yang menunjukkan bahwa tipe pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota melalui internet.

Disisi lain, Trisnawati dan Achmad (2014) menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota melalui internet. Berbeda dengan Handayani (2010) yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi penyimpangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan mendorong pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk menutupi informasi yang dimiliki, sehingga tingkat pengungkapan laporan keuangan menjadi rendah. Pemerintahan yang mendapatkan opini audit yang baik cenderung mengungkapkan laporan keuangannya kepada publik. Sedangkan jika pemerintahan mendapatkan opini yang kurang baik, akan memunculkan persepsi negatif dari masyarakat mengenai laporan keuangan pemerintah.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya dan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan Achmad (2014), membuat peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Melalui Internet”**. Adapun perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Trisnawati dan Achmad (2014) dengan penelitian ini adalah:

1. Penggunaan tahun observasi yaitu LKPD tahun 2015 dimana pada tahun 2015 merupakan batas akhir penerapan PP. Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP Akrual. Sedangkan penelitian sebelumnya masih menggunakan LKPD tahun 2012.
2. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 320 pemerintah daerah kabupaten dan kota atau 62,14% dari jumlah populasi keseluruhan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia sebanyak 515 pemerintah daerah, sehingga diharapkan hasil

penelitian ini dapat mewakili seluruh populasi. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan sampel sebanyak 210 pemerintah daerah kabupaten dan kota.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Apakah kompetisi politik berpengaruh positif terhadap publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota melalui internet?
2. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota melalui internet?
3. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota melalui internet?
4. Apakah kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota melalui internet?
5. Apakah tipe pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota melalui internet?
6. Apakah opini audit berpengaruh positif terhadap publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota melalui internet?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari kompetisi politik terhadap publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota melalui internet.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota melalui internet.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* terhadap publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota melalui internet.
4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kekayaan pemerintah daerah terhadap publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota melalui internet.
5. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tipe pemerintah daerah terhadap publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota melalui internet.
6. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh opini audit terhadap publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota melalui internet.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur untuk mengembangkan penelitian selanjutnya tentang sektor publik, khususnya penelitian

tentang pengungkapan informasi keuangan secara sukarela dan transparansi pemerintah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan diharapkan setelah adanya penelitian ini dapat meningkatkan pengungkapan informasi keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar kualitas pelaporan lebih baik.

3. Untuk Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan kepada regulator atau pembuat regulasi (legislatif), atas pentingnya pengungkapan informasi keuangan melalui internet untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.